

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan tentunya dengan harapan mempunyai tujuan yang jelas. Harapan tersebut tentunya tidak jauh dari bagaimana perusahaan mampu mempunyai *competitive advantage* dan *superior profitability* secara berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut setiap perusahaan tentunya mempunyai *strategic plan* untuk mengarahkan perusahaan ke tujuan yang dimaksud. Menurut pakar keuangan, tujuan perusahaan tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya saja *strategic plan* untuk mencapainya yang berbeda-beda. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tugas manajer keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan adalah untuk mensejahterakan pemegang saham. Tercapai atau tidaknya tujuan ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan manajemen keuangannya. Keputusan-keputusan tersebut terkait tiga bidang yaitu *capital budgeting*, bagaimana perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang suatu perusahaan, *capital structure*, bagaimana bauran dari utang dan ekuitas yang dijaga oleh perusahaan, serta *working capital*, bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan asset dan liabilitas jangka pendek yang dimiliki (Stephen A. Ross, 2015).

Namun, pada kenyataannya strategi dan keputusan tersebut sering terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tidak jarang perusahaan berskala besar ataupun berskala kecil yang telah beroperasi lama mesti mengalami likuidasi karena kesulitan keuangan yang dialami. Untuk mengantisipasi hal ini dimasa mendatang, analisis

memprediksi kebangkrutan harus dilakukan. Cara yang dilakukan dalam memprediksi hal itu adalah memahami sebuah laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, memahami kualitas akuntansi perusahaan, “Moral Hazard” dalam utang (manajemen lebih mementingkan pemilik daripada kreditor), (Platt & Platt, 2012).

Namun hal yang paling mudah untuk memprediksi hal tersebut adalah menggunakan rasio analisis. Banyak rasio perlu dipertimbangkan dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Analisis rasio ini digunakan karena dapat membantu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Mengingat seringnya muncul fenomena kebangkrutan yang terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia, maka diperlukan melakukan analisis pada rasio-rasio keuangan (Adriana, 2010)

Belum lama ini *financial distress* juga dialami oleh salah satu perusahaan milik negara yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayarkan klaim polis pada nasabahnya atau Jiwasraya dituding gagal bayar. Dirilis dari (cnbcindonesia, 2019) mengenai prahara gagal bayar Jiwasraya. Tahun 2013 produk gagal bayar Jiwasraya adalah JS Proteksi Plan, produk ini tipe asuransi *single premi*. Produk ini memiliki kelebihan imbal 6,5% dan dapat dicairkan tiap tahun. Kemudian tahun 2017, Jiwasraya membukukan dengan mengklaim laba perolehan sekitar 2,4 triliun, namun faktanya tidaklah demikian. Pada akhir 2018 Jiwasraya mulai mengalami kesulitan untuk membayarkan polis yang sudah jatuh tempo untuk Js proteksi Plan dengan total 802 M. kesulitan atau likuiditas yang

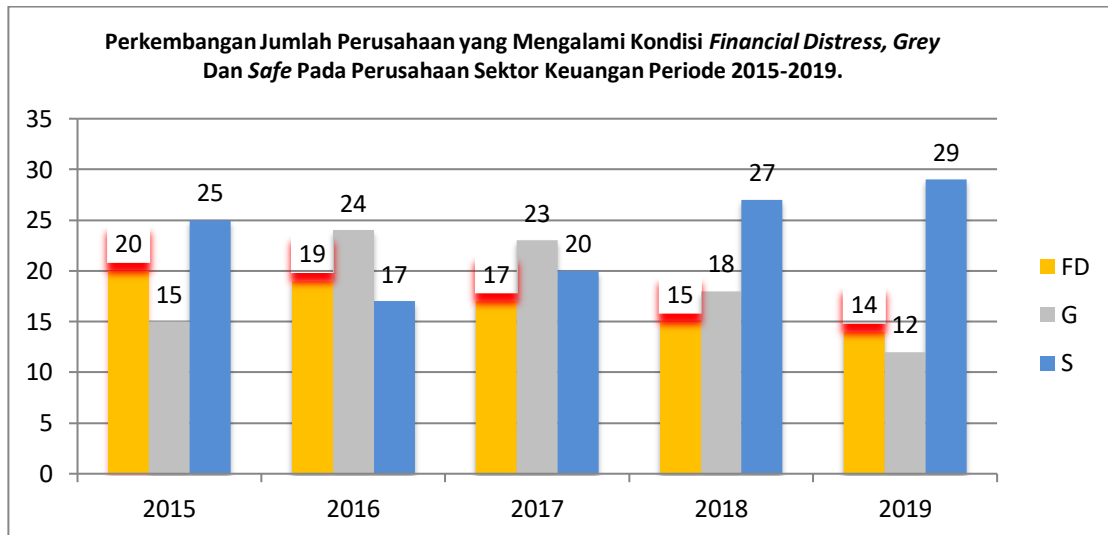
tertekan dialami oleh Jiwasraya disebabkan oleh trend kinerja investasi yang menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan Jiwasraya menempatkan investasi pada instrument yang kurang tepat. Tercatat Jiwasraya melakukan investasi sebesar 42,37 T pada instrument yang tidak likuid. Ditengah kesulitan keuangan yang dialami Jiwasraya, perusahaan tersebut malah menawarkan opsi untuk nasabah yaitu *Roll over*, artinya perpanjangan polis dengan imbal hasil 7%. Bagi nasabah yang menolak *roll over*, Jiwasraya menjajikan kompensasi sebesar 5,2% per tahun untuk penundaan pencairan dana. Kesulitan keuangan yang dialami oleh Jiwasraya tentunya memberikan kesan negatif terhadap pihak eksternal perusahaan. kepercayaan masyarakat akan hilang, dan tentunya sulit bagi perusahaan untuk melakukan operasi yang berkelanjutan.

Melihat fakta buruk yang terjadi pada jiwasraya, tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi investor untuk lebih berhati-hati melakukan investasi perusahaan terutama di sektor keuangan agar tidak mengalami kerugian. Tidak hanya Jiwasraya yang terancam bangkrut, namun ada beberapa asuransi mengalami kondisi *financial distress* akibat gagal bayar, diantaranya PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, dan Belum lama juga terjadi pada PT Asuransi Bumiputera (Rahajeng, 2020). Tidak hanya di asuransi, perusahaan sektor perbankan menunjukkan yang cukup banyak berada pada kondisi *financial distress* bahkan terancam bangkrut, dikutip dari artikel (Anggraeni, 2020) menunjukkan bahwa ada 103 bank terancam bangkrut sejak 2006 hingga 2020. Berikut data

perkembangan total perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress*, *grey* dan *safe* pada perusahaan sektor keuangan periode 2015-2019.

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan yang Mengalami Kondisi *Financial Distress*, *Grey* Dan *Safe* Pada Perusahaan Sektor Keuangan Periode 2015-2019.



Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu ada perusahaan yang mengalami *financial distress* disektor keuangan, total tersebut hampir mencapai 50% dari total perusahaan setiap tahunnya, jika dijumlahkan dengan perusahaan yang pada kondisi *grey* maka akan mengalahkan dari total perusahaan yang berada pada kondisi *safe*.

Menteri keuangan, Sri Mulyani menjelaskan dimana sektor yang rentan berada pada kondisi *financial distress* adalah sektor keuangan, dan faktor yang selalu menjadi penyakitnya adalah buruknya tata kelola korporasi. Tata kelola yang lemah justru menjadi ancaman dan tantangan bagi perusahaan itu sendiri. Agar hal ini tidak

memunculkan *moral hazard*, maka sangat perlu diawasi dan dikelola secara baik. (cnbcindonesia, 2020).

Penerapan *tata kelola perusahaan yang baik* sangat penting untuk perusahaan., karena mampu mengurangi *financial distress* atau kesulitan keuangan. Tata kelola yang baik menggambarkan keadaan perusahaan yang sehat, jauh dari resiko kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan. Selain itu, GCG ini juga merupakan kunci sukses bagi perusahaan yang mampu bersaing secara global dan memperoleh laba dalam jangka panjang. Sistem tata kelola yang lemah di perusahaan justru dapat menjadi faktor kebangkrutan di perusahaan. Kelemahan tersebut bisa dinilai dari kurangnya pengawasan oleh komisaris, pelaporan keuangan yang tidak transparan, bukti transaksi saham yang tidak transparan. Sebagai contoh lemahnya praktik *corporate governance* belum lama ini terjadi pada kasus Jiwasraya gagal bayar polis asuransi, korupsi ASABRI dan permasalahan di Bank Muamalat (Financial.bisnis.com, 2020).

Permasalahan yang ditemukan pada perusahaan terutama sektor keuangan yang terdiri dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penyakit utamanya adalah disebabkan oleh tata kelola yang dianggap tidak transparan, manajemen yang tidak baik, hingga permasalahan direksi yang melakukan aksi KKN yang merugikan perusahaan. Aksi KKN yang dilakukan oleh direksi perusahaan dikarenakan adanya pengaruh politik dalam operasional dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan politik sangat rentan dengan korupsi, karena hubungan tersebut sering dimanfaatkan oleh partai politik dengan tindakan yang hanya memberi keuntungan bagi mereka (Bushman & Smith, 2001).

Menurut Al-dhamari, R., & Ismail, (2015) tidak sedikit perusahaan melakukan hubungan politik untuk mengejar profit, perusahaan cenderung mendekatkan aktivitas bisnisnya dengan politisi maupun pemerintah, karena hubungan tersebut dianggap mampu memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti adanya potongan pajak, pemberian subsidi dari pemerintah serta kekuatan pasar, dan lain-lain.

Dari sisi manajemen bisnis, masuknya politisi atau orang-orang dekat dengan kekuasaan akan menimbulkan berbagai persoalan. Isu yang biasanya muncul terkait adanya pertentangan tujuan, dan minimnya transparansi di perusahaan dan gangguan politik. Dalam hal gangguan politik, para politisi dan orang yang dekat penguasa yang memiliki kuasa terhadap perusahaan kerap dengan bebas mengutak atik perusahaan sesuai dengan selera pribadi dan kelompok mereka sehingga menimbulkan kerugian yang berakibat pada kebangkrutan perusahaan tersebut. Politik dan bisnis adalah dua hal yang sulit dipisahkan, mereka saling berkaitan. Tujuan dari politik adalah merancang kebijakan publik, dimana terdapat kepentingan bisnis di dalamnya. Dan kepentingan bisnis dapat menunjang politik berupa pendanaan. Perusahaan yang memiliki hubungan politik juga memiliki banyak keuntungan terutama mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, tidak sedikit pula kerugian atau perusahaan tidak diuntungkan karena terdapat ketidakcocokan tujuan antara politik dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan mensejahterakan pemegang saham (Wulandari, 2013).

Melihat permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa sebenarnya yang membuat perusahaan berada pada kondisi *financial distress*.

Dalam tata kelola yang baik tentunya ada beberapa komponen yang perlu dikaji, yang dinilai sebagai element dalam penilaian GCG. Adapun beberapa komponen yang digunakan yang juga menjadi variabel independen pada penelitian ini diantaranya: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan komisariss independen, (Adrian Sutedi, 2012).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank, termasuk perusahaan asuransi, reksa dana, perusahaan investasi, dimana lembaga yang dimaksud melakukan pengelolaan atas nama orang lain. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi perusahaan dimasa mendatang. Hasil penelitian oleh Djakman dan Machmud (2010) menemukan bahwa kepemilikan institusional, berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal tersebut dikarenakan laba yang dihasilkan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Pihak institusional mengawasi manajemen sehingga membuat manajemen memberikan yang terbaik untuk perusahaannya.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *financial distress* dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak pengelola perusahaan juga terlibat dalam pemilik saham. Hal ini berarti ada fungsi ganda oleh manajer perusahaan. Fungsi manajer sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemilik saham (Agusti, 2013). Menurut Nidia Galuh Hendriani, (2011) kepemilikan manajerial suatu perusahaan dapat mendorong manajer untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik sehingga mampu membuat

perusahaan terhindar dari masalah *financial distress*. Akan ada pengawasan yang dilakukan terkait kebijakan-kebijakan perusahaan karena adanya kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan. Jadi, dalam hal ini manajer harus mampu menghasilkan kinerja yang baik agar terhindar dari *financial distress*. Potensi penurunan kesulitan keuangan pada perusahaan seiring dengan peningkatan pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mampu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, dan hal ini mampu menurunkan kemungkinan terjadinya *financial distress*. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada *financial distress*, (Emrinaldi, 2007).

Faktor selanjutnya adalah kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah merupakan dimana perusahaan tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah memiliki hak untuk mengelola dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Menurut Fadhilah & Syafruddin (2013) variabel kepemilikan pemerintah menggambarkan kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan atas proporsi saham yang dimiliki. Pemilihan kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini adalah membantu kepentingan antara kepentingan pemegang saham dan manajer. Hu Dan Zheng (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Kepemilikan saham oleh pemerintah di perusahaan, mampu mendorong perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga hal ini mampu menurunkan potensi terjadinya kesulitan keuangan perusahaan. Pemegang saham pemerintah melakukan pengawasan

kinerja perusahaan dapat menurunkan kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi *financial distress* dalam penelitian ini adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi atau tidak berhubungan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris maupun direksi yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional dan kebijakan-kebijakan lainnya suatu perusahaan. Menurut Linoputri (2010) bertambahnya proporsi komisaris independen akan memperkecil kemungkinan terjadinya *financial distress* karena perusahaan akan mendapatkan pengawasan dari pihak independen.

Selain beberapa mekanisme tata kelola tersebut yang menjadi faktor dalam memprediksi kondisi keuangan perusahaan yang mulai menurun atau dikenal dengan *financial distress*, ada faktor lain yang mempengaruhi perusahaan sehingga terhindar dari *financial distress*, yaitu pengaruh lingkungan politik. Lingkungan politik seringkali digunakan perusahaan untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Lingkungan politik yang dimaksud ini adalah *political connection*. *Political connection* merupakan hubungan mencakup pejabat atau petinggi negara dan politisi serta kerabat dekat yang menjadi direktur atau pemegang saham besar suatu perusahaan (Faccio, 2006). Menurut Faccio (2006) perusahaan yang memiliki *political connection* merupakan hal yang lumrah di berbagai perusahaan dunia. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki koneksi politik terbanyak. Menurut Kim & Zhang (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi

politik akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, dan risiko pemeriksaan pajak rendah. Namun, menurut Chaney et al., (2011) perusahaan yang terkoneksi politik, secara akuntansi memiliki kualitas kinerja yang lebih buruk dibandingkan sebaliknya. Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai *political connection* terhadap kondisi perusahaan menjadi fenomena untuk menguji apakah *political connection* akan mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi *financial distress* dalam penelitian ini adalah *Gender Diversity* (keragaman gender) dewan direksi. Keragaman gender merupakan perbedaan proporsi gender antara laki-laki dan perempuan dalam suatu dewan yang dapat memengaruhi dalam pelaksanaan *Good corporate governance* dalam perusahaan. Menurut Fathonah et al., (2019) struktur dewan dalam tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh yang kuat atas aktivitas yang dilakukan dewan dan manajemen puncak yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya melalui keberagaman dewan direksi (*diversity*). Dalam pengambilan keputusan, wanita lebih bersikap hati-hati, cenderung menghindari risiko tinggi dan lebih teliti daripada laki-laki. Begitu pula, dalam risiko, wanita cenderung tidak berani dalam mengambil risiko yang lebih besar, akibatnya kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* lebih kecil (Kristanti et al., 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi *financial distrees* dalam penelitian ini adalah *board size*. *Board size* merupakan total keseluruhan komisaris suatu perusahaan. Menurut Appuhami, R., Bhuyan, (2015) *board size* ini mengacu pada jumlah anggota dewan komisaris pada suatu organisasi. Dewan komisaris memiliki tanggungjawab

untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada dewan direksi yang bertanggungjawab langsung pada operasional perusahaan. Ketidakmampuan dewan dalam memonitor CEO sertanya kurangnya kontribusi mereka dalam pengambilam suatu kebijakan akan berdampak pada perusahaan selama periode kesulitan keuangan (Fathi & Jean-Pierre, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Manzanque et al., (2016) menemukan hasil *board size* memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Perusahaan dengan dewan lebih banyak, akan mampu menghindari *financial distress*. Besarnya jumlah dewan berarti fungsi pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan relatif lebih kuat, sehingga hal itu dapat mengurangi adanya potensi *financial distress*.

Dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasi. Melihat beberapa rasio yang berkemungkinan valid dalam melihat *sustainable* dari perusahaan tersebut. Menurut Munawir (2010) laporan keuangan merupakan suatu platform yang menghubungkan setiap element internal perusahaan dengan pihak eksternal atas aktivitas perusahaan. Menurut Kasmir (2014) laporan keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai bentuk dan jumlah aktiva, pendapatan, kinerja manajemen, kewajiban dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu perusahaan.

Untuk memudahkan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat bisa menggunakan model Altman *Z-Score*. Menurut Febriana (2018) menunjukkan bahwa model Altman memiliki keakurasian paling tinggi sebesar 51,6% dalam memprediksi *financial distress* dibandingkan dengan

model lainnya yaitu model Zmijewski, model Ohlson dan model Grover. Analisis Altman *Z-Score* ditemukan oleh Edward I Altman pada 1968 sebagai hasil dari penelitiannya. Dia menemukan 5 rasio dari 22 rasio yang diseleksi bisa dikombinasikan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pham Vo Ninh et al., (2018), yang menjadikan objek perusahaan-perusahaan yang berlaku di Vietnam periode 2003-2016, ditemukannya bahwa faktor akuntansi dan pasar serta faktor fundamental mempengaruhi *financial distress* (Pham Vo Ninh et al., 2018). Ko et al., (2017) menerapkan model Altman untuk memprediksi *financial* pada perusahaan tenaga energy surya periode 2004-2014, menemukan bahwa efisiensi laba dari perusahaan yang tertekan di industri energi surya Taiwan telah menurun dengan model tersebut.

Selama dua puluh dekade terakhir model Altman *Z-Score* terbukti cukup valid sebagai indikator dalam menilai kondisi suatu perusahaan. Hasil yang sama dengan penelitian Djamaluddin Said (2017) menemukan bahwa model Altman merupakan model yang sesuai dalam menilai atau memprediksi baik-buruknya kinerja perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Daniela et al., (2016), menemukan bahwa untuk evaluasi akhir, Altman *Z-Score* sangat relevan digunakan perusahaan konstruksi di Slovakia. Hasil sama juga ditemukan oleh (Sukmawati & Adiputra, 2014), studi pada perusahaan perbankan di Indonesia, menemukan Altman *Z-Score* berpengaruh terhadap harga saham.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti memilih perusahaan sektor keuangan yang terdiri dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang *listing* di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2017-2019 sebagai objek penelitian. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, komisaris independe dan *political connection*. Sedangkan untuk *gender diversity* dan *board size* merupakan variabel kontrolnya. Penelitian ini tentunya diharapkan nantinya dapat memberikan pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan dalam pengambilan langkah untuk berinvestasi. Sesuai penjelasan diatas. Maka, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan *Political Connection* Terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada Perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
5. Bagaimana pengaruh *Political Connection* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI ?

6. Bagaimana pengaruh variabel kontrol *gender diversity* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI ?
7. Bagaimana pengaruh variabel kontrol *board size* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada Perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
5. Untuk mengetahui pengaruh *Political Connection* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol *gender diversity* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?
7. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol *board size* terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sokongan untuk setiap elemen yang terkait dalam perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perencanaan investasi dimasa mendatang. Serta berguna untuk pihak perusahaan agar mengetahui kondisi perusahaan mereka.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian mengenai *financial distress* dengan model yang lainnya.

1.5. Ruang Lingkup

Agar tercapainya sasaran dan terarahnya penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan menjadikan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, komisaris independen dan *political connection* sebagai variabel independen serta *financial distress* sebagai variabel dependen. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan mengenai isi dari masing-masing bab secara jelas dan tepat dari kelengkapan penelitian, sistematika dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sisteamtika penulisan.

BAB II Tinjauan Literatur

Pada bab ini akan dijelaskan terkait kajian teori, penelitian terdahulu dan penurunan hipotesis serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan terkait bagaimana pengolahan dan pengumpulan data, data variabel yang digunakan serta indikatornya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian yang digunakan secara umum, interprestasi hasil dan analisis data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan.

BAB V

Pada bab ini terkait tentang bagaimana kesimpulan dan saran penelitian yang sesuai dengan hasil akhir pnelitian.

